

## Implementetation of Gender Based Village Development [Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender]

Nur Danisa Rahmadani <sup>1)</sup>, Isna Fitria Agustina, M.Si <sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnaagustina@umsida.ac.id](mailto:isnaagustina@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to determine the implementation of gender-based village development in Candiwates Village, Prigen District, Pasuruan Regency. This research uses a qualitative descriptive research form. The method used is a qualitative method. Data collection methods were carried out by interviews, observation and documentation. The data analysis method uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. Village Development is a development method and approach programmed by the state (government and society) by mobilizing its capabilities to develop communities in rural areas. Village Development aims to improve the quality of human resources, including creating a climate that encourages the growth of initiative and self-reliance in village communities. Gender equality is related to aspects of welfare. As stated in the targets for achieving gender equality and empowering women set by the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas), women's involvement is an absolute requirement in efforts to realize equitable development. The results of this research show that the implementation of Gender-Based Village Development is still not optimal in its implementation. Where there are still several problems that are explained in accordance with Edward III's Theory with four indicators, including: The first is Communication, in this indicator it can be proven by good socialization in delivering programs or activities regarding women's gender in village development. Secondly, Resources, in the application of this indicator, cannot be said to meet the criteria in the jobdesk for each officer, however for Financial Resources they are in accordance with the budget distributed. The third is Disposition, in this policy it is proven that the implementer's attitude in planning a gender-based village development program aims to help all men and women without looking at the other side so that they are equally developed and involved and finally Bureaucratic Structure, Bureaucratic structure in the Implementation of Village-based Development gender in Candiwates village has developed good relationship patterns that are in accordance with the job desk or duties of each village apparatus..*

**Keywords -** *Implementation; Village Development; Gender Equality*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pembangunan Desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Kesetaraan gender berkaitan dengan aspek kesejahteraan. Sebagaimana yang tertuang di dalam target dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Perempuan dalam keterlibatannya menjadi syarat yang mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender masih belum maksimal dalam penerapannya. Dimana masih terdapat beberapa permasalahan yang dipaparkan sesuai dengan Teori Edward III dengan empat indikator antara lain : Yang pertama Komunikasi, dalam indikator ini dapat dibuktikan dengan sosialisasi secara baik dalam menyampaikan Program atau kegiatan tentang gender perempuan dalam pembangunan desa . Yang kedua Sumber Daya, dalam penerapan indikator ini belum bisa dikatakan memenuhi kriteria dalam jobdesk masing-masing petugas, akan tetapi untuk Sumber Daya Financial sudah sesuai dengan anggaran yang disalurkan. Yang ketiga Disposisi, Dalam kebijakan ini terbukti sikap pelaksana merencanakan program pembangunan desa berbasis gender bertujuan membantu semua kalangan laki-laki dan perempuan tanpa melihat dari sisi lainnya agar sama-sama berkembang dan terlibat dan yang terakhir Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi dalam Implementasi Pembangunan Desa berbasis gender di desa Candiwates ini sudah menyusun pola-pola hubungan yang baik yang sesuai dengan jobdesk atau tugas masing-masing aparatur desa.*

**Kata Kunci -** *Implementasi ;Pembangunan Desa;Kesetaraan Gender*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan Desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan [1]. Pembangunan Desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa [2]. Pembangunan pedesaan menjadi salah satu tema yang sering dibahas dengan berbagai pendekatan teoritik dan bangunan model yang beragam. Namun demikian, pada perkembangannya persentase penduduk miskin di pedesaan terus meningkat pesat. Idealnya, pembangunan pedesaan harus mampu meningkatkan status ekonomi pedesaan, berkonsentrasi pada perubahan sosial yang mempengaruhi berbagai kehidupan orang di pedesaan [3].

Kesetaraan gender telah menjadi isu kebijakan universal, dan telah menjadi gerakan di hampir setiap sudut dunia. Dengan kesetaraan gender berarti tidak terdapat pembakuan kedudukan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi serta kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki [4]. Gender bukanlah perbedaan jenis kelamin melainkan perbedaan fungsi dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitar terhadap perempuan dan laki-laki yang melahirkan pembagian peran dan fungsi sosial yang berbeda [5]. Pembagian peran dan fungsi sosial tersebut berdasarkan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, yang diatur menurut nilai-nilai, norma, adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat [6]. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat, karena dapat dipertukarkan antara tempat satu dengan tempat lainnya, dan antara perempuan dan laki-laki [7]. Kesetaraan gender berkaitan dengan aspek kesejahteraan. Sebagaimana yang tertuang di dalam target dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) [8].

Perempuan dalam keterlibatannya menjadi syarat yang mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan (Syukur, 2020). Dalam suatu negara tidak bisa sejahtera dan maju apabila perempuannya dalam suatu negara di biarkan menderita, tersiksa dan terlantar begitu saja. Saat ini, semakin banyak perempuan yang berkiprah di ranah publik. Keterlibatan perempuan di ranah publik tidak saja ditemukan pada sektor informal, tetapi juga pada sektor formal. Keterlibatan perempuan di ranah publik memunculkan dilema terkait peran ganda yang dipikul kaum perempuan, hal ini disebabkan karena perempuan yang terlibat di ranah publik tidak serta merta dapat melepaskan perannya di ranah domestik [6]. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama dalam pembangunan perempuan, pertama pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pencegahan kekerasan [9]. Sebagai langkah strategis untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender sekaligus untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) [10]. Kesetaraan gender menjadi satu dari 17 target SDGs yang harus di capai pada tahun 2030. Tujuan pencapaian SDGs dalam aspek kesetaraan gender mencakup upaya untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual [11].

Strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender [12]. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan maka diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. [13]. Fakta bahwa perempuan masih menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan di banyak negara membuat pentingnya meningkatkan kemampuan perempuan dalam upaya pembangunan kesetaraan gender. Akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kepemimpinan, dan hak-hak lainnya seringkali terbatas. Hal ini menghambat mereka dalam membuat keputusan yang tepat dalam hidup mereka dan membatasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Selain itu, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan sering terjadi karena banyak negara belum mengakui hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Dalam beberapa budaya dan tradisi, perempuan seringkali menghadapi diskriminasi gender dan kekerasan [14].

Setidaknya, pembangunan nasional dapat memenuhi kebutuhan semua orang Indonesia. Setelah lebih dari dua puluh tahun sejak Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, diharapkan program PUG telah berkembang di setiap tahap pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. PUG adalah metode yang digunakan negara kita untuk mengatasi berbagai kompleksitas masalah kesenjangan gender yang ada. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah diminta untuk memasukkan gender ke dalam semua dimensi pembangunan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan akhirnya evaluasi dan audit. Inpres tersebut telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun. Oleh karena itu, kita harus meninjau kemajuan kesetaraan

gender di Indonesia [14]. Salah satu upaya penting dalam membangun kesetaraan gender adalah pengembangan kapasitas perempuan. Ini karena, dalam masyarakat yang masih terjadi diskriminasi gender, perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas perempuan sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama dalam berbagai bidang kehidupan [15].

Pengembangan kapasitas perempuan baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Perempuan yang memiliki kapasitas yang baik akan lebih mampu membuat keputusan yang lebih baik dalam hidupnya dan lebih siap menghadapi tantangan di tempat kerja atau bahkan dalam keluarga mereka. Pengembangan kapasitas perempuan akan memungkinkan perempuan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Perempuan dengan keterampilan yang baik akan lebih mudah memasuki pasar kerja untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang juga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan [16]. Pengembangan kapasitas perempuan juga penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Agenda 2030 Perserikatan Bangsa - Bangsa, gender dan peningkatan kapasitas perempuan dianggap sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kemampuan perempuan, mereka akan lebih mampu berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.

Proses penelitian dilakukan di Desa Candiwates Kabupaten Pasuruan dengan perolehan data jumlah penduduk terutama “Perempuan” pada tahun 2022 dengan jumlah Wanita 2.666 orang dari total penduduk 5.831. Sedangkan pada tahun 2023 dengan jumlah 2.535 dari total penduduk 5.213. Dengan tahun yang berbeda memiliki persentase yang rata-rata 80% usia produktif dan 20% usia lanjut serta balita atau belum cukup umur. Berikut adalah tabel jumlah penduduk terutama perempuan dan keseluruhan jumlah penduduk sebenarnya :

**Tabel 1** Jumlah Penduduk Desa “Perempuan”

Jenis Kelamin	Tahun	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk Keseluruhan
Perempuan	2022	2.666	5.831
Perempuan	2023	2.535	5.213

*Sumber : Diolah dari Data Pemerintah Desa*

Dalam implementasi kesetaraan gender jumlah perempuan produktif yang ada pada perekonomian desa dapat dibantu tanpa harus mengandalkan pekerjaan dari laki-laki saja. Maka dari itu dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan oleh semua gender baik dilakukan perempuan maupun laki-laki untuk mengoptimalkan kinerja dari gender masing-masing. Serta dalam pelaksanaannya tidak ada unsur keharusan dalam melakukan suatu pekerjaan yang biasanya masih sering kita dapati dalam kegiatan sosial yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Dalam konsep Pembangunan desa, penelitian ini menggunakan teori dari Marbun (2002:113) bahwa Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Indikator teori Pembangunan Desa menurut Marbun (2002:113) meliputi : Pertama, Aspek kehidupan masyarakat desa, dalam indikator ini menjelaskan tentang ciri-ciri kehidupan masyarakat desa dan karakteristik masyarakat desa. Yang kedua Perkembangan swadaya masyarakat desa, dalam indikator ini menjelaskan tentang kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya. Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada.

Selain teori Pembangunan Desa, penelitian ini juga menggunakan konsep teori Implementasi dari Edward III yang memiliki empat indikator, diantaranya Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi. Dengan demikian Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender harus diterapkan secara adil, akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan dalam kesetaraan gender ini, sebagaimana dijelaskan dari Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai Upaya pembangunan kesetaraan gender yang pertama penelitian dari Erna Ermawati Chotim berjudul “Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made)”. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menilai tingkat pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan 3 indikator penting yaitu: partisipasi dalam

Pendidikan di tingkat dasar, menengah dan tinggi, pekerjaan dan keputusan politik, memanfaatkan sumber data sekunder dan berharga. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pendekatan deskriptif, dengan narasumber pemilik Cirebon Home Made [18]. Yang kedua penelitian dari Suriani Nur berjudul “Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup”. Dalam penelitian ini membahas tentang kemampuan perempuan dalam menata sumber daya alam dan lingkungan hidup, namun kurangnya kepercayaan diri membuat para perempuan jarang ikut adil dalam semua kegiatan pembangunan di Indonesia dan termasuk lingkungan hidup. Karena strategi pengarusutamaan perempuan penting diposisikan di tempat

utama dalam setiap strategi pembangunan [19]. Yang ketiga penelitian dari Elsa Purwaningsih dengan judul “ Prespektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prespektif kesetaraan gender terhadap kemajuan pembangunan daerah di Kecamatan Tomori Kabupaten Lawu Timur melalui organisasi PKK. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menghasilkan data ber bentuk deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian yg di lakukan pemerintah telah mencangkan strategi pembangunan kesetaraan gender melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi di Kecamatan Tomori [20]. Dan yang terakhir Mulia Munaafaturisa dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Simpan Pinjam Bagi Perempuan di Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam kegiatan yang ada di simpan pinjam bagi perempuan di Desa mereng, mengetahui kebutuhan praktis dan strategi perempuan yang telah dipenuhi oleh program simpan pinjam bagi perempuan, serta untuk mengetahui tingkat keberdayaan perempuan yang mengikuti program simpan pinjam bagi perempuan. Dengan kesimpulan bahwasannya perempuan telah berpartisipasi dalam kegiatan Program Simpan Pinjam namun belum memiliki kontrol dalam program tersebut [10]. Dari uraian beberapa penelitian terdahulu sudah dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender masih belum maksimal dalam penerapannya secara merata.

Dalam Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender ini lebih fokus dalam Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan aspek terpenting agar tercapainya kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan peran serta dan juga daya dukung yang berupa sumber daya manusia. Dalam peningkatan peran serta kesetaraan gender, Perempuan di Candiwates yang memasuki usia produktif yang dimana mereka masih belum mempunyai pekerjaan sehingga peran desa diperlukan untuk melakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi kaum perempuan agar dapat menciptakan peluang kerja mereka sendiri. Kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang setiap hari meningkat, sebaliknya dengan jumlah pengurangan penduduk dapat terjadi karena angka kematian yang bisa meningkat dalam hitungan perbulan. Dan ini menjadi perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam setiap tahun ada perubahan. Berikut juga dijelaskan dalam tabel uraian RPJM Desa tentang Anggaran Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dalam peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender :

**Tabel 1** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa Tahun 2022 – 2023

Bidang Pembangunan	Anggaran	
	2022	2023
Honor Kader Kesehatan dan Stunting	26.500.000	19.125.000
PMT Posyandu dan Stunting	56.710.000	56.710.000
Penyuluhan Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Kader dan Rembuk Stunting	24.000.000	22.540.000
Pelatihan membuat kue kering	4.580.000	6.580.000
Pelatihan membuat kue berbahan baku ubi	4.580.000	6.580.000
<b>Total</b>	<b>116.370.000</b>	<b>111.535.000</b>

*Sumber : Diolah dari Data Pemerintah Desa*

Pada Tabel 1.2 menjelaskan tentang uraian bidang Pembangunan yang melibatkan Peningkatan Peran serta Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan pada tahun 2022-2023. Dalam uraian menjelaskan anggaran yang digunakan untuk program Peningkatan Peran serta Perempuan tersebut diantaranya adalah Honor Kader untuk Perempuan yang menduduki posisi Kader, PMT Posyandu ini juga melibatkan kegiatan perempuan, Penyuluhan Kesehatan, serta Pelatihan memasak pada Ibu-Ibu PKK. Dengan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 dari yang paling rendah 4.580.000 hingga anggaran yang paling tinggi 56.710.000, dalam kurun berjalannya tahun ke tahun.

Peningkatan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022, penurunan mencapai 30% dalam setiap pembangunan, dan ada juga kenaikan dari salah satu bidang pembangunan yaitu Pelatihan Memasak, dengan peningkatan mencapai 30%. Jadi dalam Implementasi Pembangunan Desa berbasis Gender berfokus pada Peningkatan Peran Serta Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Desa dengan program kerja atau organisasi seperti Kader, PKK, Posyandu, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah tabel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa dalam Peningkatan Peran Serta Perempuan dan Kesetaraan Gender Tahun 2022 dan 2023, antara lain :

**Tabel 1** Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa  
Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>		
	<b>Pendapatan Asli Desa (PAD)</b>	<b>20.400.000</b>	<b>20.400.000</b>
<b>2</b>	<b>Bidang Pembangunan</b>	<b>340.045.500</b>	<b>340.045.000</b>
	Sub Bidang Kesehatan	136.170.000	136.170.000
<b>3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>144.866.500</b>	<b>144.866.500</b>
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	134.991.500	134.991.500
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	9.875.000	9.875.000

*Sumber : Diolah dari Data Pemerintah Desa*

Pada Tabel 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dalam Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender pada Tahun 2022 dan 2023, menjelaskan uraian Pendapatan Asli Desa (PAD), Belanja yang terdiri dari 2 bidang, antara lain Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kesesuaian dalam penggunaan atau penerapannya. Dengan anggaran yang diberikan atau diterapkan, Desa Candiwates menerapkan dengan sesuai nominal yang sudah ditentukan. Jadi dalam hasil anggaran pun tidak terlihat surplus atau defisit, karena hasil menjelaskan setara atau sesuai. Dari uraian kedua tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa RPJM Desa ini merupakan data anggaran yang di keluarkan oleh desa pada tahun 2022-2023 dengan rincian bidang pembangunan dan program yang berhubungan dengan kesetaraan gender serta jumlah anggaran yang dikeluarkan dari data desa. Dari data anggaran desa didapatkan ada kenaikan anggaran dikarenakan terdapat program baru yaitu rehab gedung ponkesdes termasuk sub bidang kesehatan dikarenakan program desa ini baru dibangun pada tahun 2023 karena dilihat dari status kesehatan di desa mengalami penurunan sehingga desa segera membangun ponkedes untuk meningkatkan status Kesehatan. Beberapa program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender yang terkait dengan kesetaraan gender yaitu honor kader kesehatan dan stunting serta PMT posyandu dan stunting, pada honor kader posyandu dan stunting mengalami penurunan anggaran hal ini disebabkan pada tahun 2022 kader posyandu memiliki tugas ganda yaitu melakukan sosialisasi terkait Covid-19. Dalam rangka penguatan kapasitas perempuan, desa telah memberikan beberapa program dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan desa yaitu bantuan benih untuk petani, pelatihan untuk membuat kue kering dan pelatihan membuat kue berbahan baku ubi mengalami kenaikan anggaran desa sehingga hal ini menjadi peningkatan ekonomi yang signifikan. Akan tetapi berdasarkan nilai anggaran, anggaran desa untuk pemberdayaan perempuan masih tergolong rendah dibandingkan dengan anggaran program lainnya.

Beberapa indikator masalah dalam Implementasi Pembangunan berbasis Gender dari tahun 2022 hingga 2023 saat ini masih belum ada kemajuan dalam target pembangunan berbasis gender di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Beberapa permasalahan dalam Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yaitu pertama Kegiatan ibu PKK Sebagian besar kegiatan tersebut belum berjalan dengan lancar, kedua Pelatihan dan workshop tentang hak – hak perempuan sebagian kecil belum terlaksana dan ketiga masih belum ada pembentukan Lembaga Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Dari permasalahan-permasalahan tersebut dan dilihat dari tabel anggaran desa didapatkan di Desa Candiwates sudah ada upaya tentang pemberdayaan dan penguatan perempuan akan tetapi upaya tersebut masih tergolong rendah dibandingkan program pembangunan desa yang lain. Dari beberapa penjabaran tabel, permasalahan sudah cukup jelas terlihat, dan juga kegiatan serta program kedepan sudah dipikirkan. Akan tetapi, masih rendahnya upaya desa dalam melakukan penguatan perempuan untuk dapat terwujudnya pembangunan desa yang berbasis gender serta permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada perencanaan pembangunan Desa Candiwates masih belum jelas kapan bisa mewujudkan harapan dan target untuk meningkatkan berbasis gender, dengan dipaparkan sesuai dengan Teori Edward III (Edward, 1980) memiliki empat indikator antara lain : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

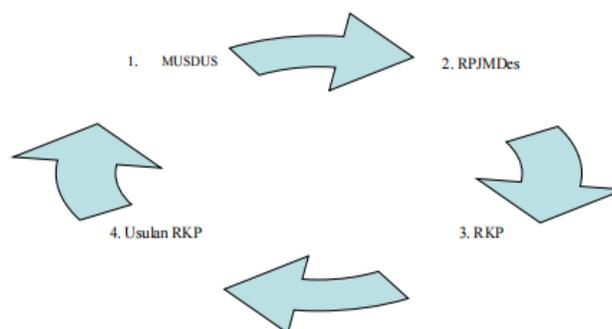
## II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembangunan desa yang berkeadilan gender dalam upaya perwujudan kesetaraan gender ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki keunggulan dalam meneliti keadaan objek yang alamiah yang digunakan untuk mendapatkan data turunan sesuai dengan fakta dilapangan. Untuk memahami dan mempelajari fenomena yang ada, peneliti harus terus mencari informasi yang relevan dalam penelitiannya [18]. Penelitian dilakukan di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Bapak Sultoni selaku Kepala Desa Candi Wates, Bu Iis selaku Ketua PKK, dan Bu Lina selaku Sekretaris Desa. Kemudian beberapa masyarakat dari Desa setempat, serta konteks penelitian. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan pengumpulan data dilakukan dalam periode waktu tertentu. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah pembangunan desa yang berkeadilan gender dalam upaya perwujudan kesetaraan gender. Pengelolaan penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hal ini berarti mengumpulkan data (data collection) dan mereduksi data yang diperoleh di lapangan dengan beberapa tahapan (data reduction), yaitu mengkategorikan dan memfokuskan pada tujuan penelitian. Kemudian, sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian pembangunan desa yang berkeadilan gender dalam upaya pembangunan kesetaraan gender di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa seperti yang diatur dalam No 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Proses penting inilah yang menjadi dalam dalam pembangunan desa. Alur pembangunan desa dapat digambarkan sesuai berikut :

Gambar 1 Proses Pembangunan Desa



Sumber :sidanegara.desa.id

Pada implementasi tatakelola pemerintahan desa dalam menunjang pembangunan desa meliputi kegiatan di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan dan di bidang kemasyarakatan. Pembangunan desa tidak lepas dari proses dan tahapan yang harus dilalui. Pada proses tersebut yang terpenting adalah pelibatan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan unsur seluruh masyarakat menjadi penting. Kesepakatan bersama dari proses pembangunan desa dimulai dari tingkat RT, RW dan Musdus. Sejauh mana unsur masyarakat dapat terlibat dalam masyarakat. Sebagaimana pengamatan yang dilakukan dapat ditemukan bahwa

keterlibatan masyarakat khususnya perempuan masih terbatas pada formalitas. Di rapat RT, RW dan Musdus hanya diwakili oleh kepentingan kelompok tertentu dan bias gender.

Dalam hal pembangunan desa, keterlibatan perempuan sebenarnya dikatakan sangat penting. Karena perempuan bisa mendominasi serta dalam partisipasi sangat berpotensi. Perempuan memiliki arti strategis dalam pembangunan desa. Namun dalam perencanaannya seringkali diabaikan dari proses yang dilalui ditingkat RT, RW, dan Musdus. Akibatnya partisipasi perempuan hanya sebatas pada pelaksana. Sisi lain pembangunan desa masih dihadapkan pada kendala antara lain, Kemampuan Personil aparat Pemerintah Desa yang masih terbatas, Kemampuan pemenuhan kebutuhan Desa masih sangat terbatas terutama dalam hal pendanaan sehingga perlu dicarikan penggalian dana yang tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku, dan Masih banyaknya sarana dan prasarana pemerintah serta jalan, irigasi dan listrik maupun tempat pelayanan masyarakat yang masih belum memenuhi syarat. Secara teori, Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender dijabarkan ke dalam teori Edward yang mempunyai empat indikator, antara lain : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, dapat dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Komunikasi

Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi ini yaitu (1) transmisi, yaitu cara informasi disampaikan kepada publik, (2) kejelasan informasi yang disampaikan, dan (3) konsisten penyampaian informasi itu. Pengertian lain Komunikasi menurut Edward III , diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada indikator komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu implementasi. Pada indikator komunikasi dibuktikan dengan wawancara secara langsung bersama salah satu aparatur desa yaitu Sekretaris Desa yang bernama Ibu Lina sebagai berikut :

*“menurut saya terkait kesetaraan gender atau berbasis gender dalam urusan pembangunan desa itu memang perlu dikaitkan. Karena pada dasarnya bukan hanya laki-laki saja dan bukan dengan perempuan saja. Harus sama-sama seimbang. Karena semua harus disetarakan agar ikut andil juga. Karena Desa maju juga pasti yang ikut andil ya masyarakat mbak. Saya juga sebagai Sekdes sendiri perempuan, jadi ya pasti saya mendukung banget kalau perempuan juga ikut berperan dalam pembangunan desa. Kalau pembuktian mungkin kita sebagai aparat perlu penyampaian informasi dan rapat. Bagaimana memilih orang yang terkait atau bertanggung jawab sebagai ketua nantinya jika ada program atau kebijakan baru dalam mewujudkan desa lebih baik. Ya sosialisasinya lebih ke rapat atau perkumpulan. Jadi masyarakat juga bisa ikut berkontribusi juga. Akan tetapi untuk saat ini memang sosialisasi terkait pembangunan desa atau membahas program baru dan mengkaitkan kesetaraan gender masih belum, jadi belum melaksanakan sosialisasi tersebut. Kendalanya juga kegiatan atau kebijakan masih belum rampung dalam penyusunan program perempuan atau berbasis gender” (Wawancara, 11 September 2023)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa di Desa Candiwates pembangunan berbasis gender tlah terlaksana sebagaimana diketahui bahwa di Desa Candiwates sekretaris desa diwakili oleh perempuan sehingga nantinya akan lebih diimplemetasikan lagi pembangunan berbasis gender di Desa Candiwates tersebut. Dimana komunikasinya melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis gender salah satunya melalui PKK Desa Candiwates tersebut. Berikut adalah salah satu bukti sosialisasi dengan ibu-ibu PKK desa Lambangan :



**Gambar 1.** Sosialisasi Pelatihan Kursus Memasak

Dalam gambar 1 tersebut Ibu-Ibu PKK bersosialisasi atau berkumpul dalam pelatihan yang diadakan di Desa Lambangan untuk ibu-ibu yang ikut bergabung dalam organisasi atau komunitas PKK. Selanjutnya setelah mendengar jawaban dari wawancara secara langsung terkait indikator Komunikasi pada Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender dapat diartikan bahwa Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Jadi dalam teori Edward pada indikator Komunikasi dalam Pembangunan Desa berbasis gender ini hal yang dilakukan seperti penyampaian informasi secara merata, melakukan sosialisasi terhadap seluruh warga desa candiwates, menyampaikan program baru atau kebijakan baru secara luas, mendengarkan segala bentuk saran dan kritik dari semua warga desa candiwates. Serta diadakan komunikasi atau penyiaran secara langsung. Akan tetapi dalam indikator komunikasi masih kurang diterapkan dalam Implementasi Pembangunan Desa berbasis gender di Desa Candiwates.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dalam Implementasi Pembangunan Desa berbasis Gender di Desa Candiwates sesuai dengan indikator Komunikasi, masih belum dikatakan maksimal. Hal ini sama dengan penelitian terdahulu dari Erna Ermawati Chotim berjudul "*Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made)*" dengan persamaan yang sama dalam mewujudkan Komunikasi yang berkembang dengan berusaha meningkatkan partisipasi dari dukungan Pemerintah Desa dan juga warga sekitar. Arti kata Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini di Desa Candiwates dalam bentuk perencanaan pembangunan desa berbasis gender. Dengan mengembangkan pemberdayaan gender, terutama pada gender perempuan. Penyampaian informasi ini seperti sosialisasi terkait program atau kegiatan perempuan di Desa Candiwates yang memang perlu dikembangkan lebih pesat lagi. Indikator ini dalam Implementasi Pembangunan Desa berbasis Gender masih belum diterapkan secara baik, dan masih perlu banyak evaluasi.

## B. Sumber Daya

Menurut Edward III, sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dalam hal ini Keberhasilan Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia antara lain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam indikator ini dibuktikan dengan wawancara secara langsung dengan Bapak Kepala Desa Candiwates yaitu Bapak Sulthoni. Sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

*"Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial dalam pembangunan desa sudah terlibat. Sumber Daya manusia malah sudah dikaitkan dalam Pembangunan desa ini, tetapi kalau dalam pembagian tugas yang memang detail itu belum terbagi secara rata atau sesuai. Karena memang masih saling bersama sama tanggung jawabnya. Sedangkan yang Sumber Daya Finansial itu memang kita sudah sesuai dalam pembagian anggaran. Seperti data yang ada disini mbak, bisa nanti dilihat. Akan tetapi kalau dikhususkan Sumber daya Manusia dan Sumber daya Finansial untuk khusus keterkaitan Berbasis Gender, kita sendiri belum melibatkan sepenuhnya. Jadi masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang nanti akan dikaitkan dengan program yang seperti apa yang penting tujuannya dalam mewujudkan desa lebih baik dan maju. Jadi menunggu seiringnya berjalannya waktu."* (Wawancara, 11 September 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa di Desa Candiwates belum menerapkan sepenuhnya implementasi pembangunan Desa berbasis gender meskipun ada keterwakilan perempuan yaitu sekretaris desa perempuan. Namun, dalam perkembangannya akan dilakukan hal tersebut sehingga Desa Candiwates semakin kuat. Hal tersebut belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan belum adanya pembagian tugas yang banyak melibatkan perempuan serta masih banyak laki-laki yang mendominasi pada pemerintahan Desa Candiwates tersebut. Ada beberapa kegiatan yang melibatkan perempuan di Desa Candiwates salah satunya kegiatan pembagian bantuan sosial dan pendataan masyarakat miskin. Hal tersebut dilaksanakan dengan menggandeng kader-kader PKK Desa Candiwates. Berikut merupakan jumlah pegawai Desa Candiwates sebagai berikut:

**Tabel 2** Pegawai Desa Candiwates

Jabatan	Jenis Kelamin
Kepala Desa	L
Sekretaris Desa	P
Kasi Pemerintahan	L

Kasi Kesra	L	
Kasi Pelayanan	L	
Kaur Perencanaan		L
Kaur Keuangan		P
Kaur TU		P
Staff Sekretaris	L	

**Sumber :** Pemerintah Desa Candiwates, 2023

Berdasarkan table 2 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai masih didominasi laki-laki. Dimana pegawai laki-laki tercatat berjumlah 6 orang dan perempuan 3 orang. Dengan hal tersebut telah diketahui bahwa jumlahnya memiliki perbedaan. Beberapa kegiatan yang dilibatkan yaitu pembagian bantuan social di Desa Candi Wates. Berikut adalah pengambilan foto secara langsung pembagian bantuan dengan beberapa aparatur desa dan warga sekitar:



**Gambar 2.** Foto bersama warga dan aparatur desa

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini disandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini. Penelitian dari Suriani Nur berjudul “Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup”. Bahwa Sumber daya pada penelitian ini juga masih belum diperlakukan seimbang, dengan banyaknya laki-laki dan perempuan lebih tidak percaya diri. Maka dari itu persamaan dengan penelitian ini sama-sama belum menetapkan jobdesk yang berlaku secara tegas, dan masih saling bantu secara bersama-sama. Yang paling penting Sumber Daya adalah hal yang penting dan dibutuhkan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan staf yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian bahwa dimensi sumber daya merupakan kunci kedua dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyampaikan informasi.

Kesimpulan dari indikator Sumber Daya menurut teori Edward bahwa secara kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Candiwates dalam menjalankan Implementasi Pembangunan Desa berbasis Gender belum bisa dikatakan memenuhi kriteria dalam jobdesk masing-masing petugas. Akan tetapi aparatur desa tetap berusaha menyusun kegiatan-kegiatan serta jobdesk masing-masing petugas dalam penerapan ini. Sumber daya finansial yang diberikan oleh pemerintah pusat pada Pemerintah Desa Candiwates sudah dikatakan sesuai dengan pembagian anggaran desa lainnya. Akan tetapi dalam pembangunan desa berbasis gender ini masih kurang melibatkan SDM, terutama gender perempuan. Jadi pembangunan desa sendiri masih terbelah fokus dengan melibatkan gender laki-laki daripada perempuan. Hal ini yang perlu dievaluasi dalam mengaitkan perencanaan pembangunan desa berbasis gender.

### C. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Pada hal ini aspek sikap para pelaksana (disposisi) merupakan aspek perilaku atau respon yang diambil agen pelaksana. Pemahaman tentang maksud dan tujuan kebijakan sangatlah penting, karena bagaimanapun juga

implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Sedangkan Pengertian Disposisi menurut Edward dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Pada indikator Disposisi yang terkait dengan Pembangunan Desa Berbasis Gender di Desa Candiwates. Melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Seksi Pelayanan Bapak Nur Wahyu menyampaikan hal sebagai berikut:

*“dengan tegas bahwa untuk masalah sikap pelaksana atau sikap aparat atau masyarakat dalam menyikapi terkait Pembangunan desa ini sudah bersikap sebaik mungkin pastinya mbak, karena memang ya kita harus memberikan sikap yang terbaik mbak dalam segi apapun. Terutama ya pembangunan desa dengan ini desa akan lebih maju dan berkembang. Kalau pembangunan desa berbasis gender kita masih menyusun program-program yang baru, tapi kita bersikap sesuai dengan aturan dan bagaimana kita berusaha peduli dalam kebijakan apapun itu dari pak Kades mbak. Jadi kalau sikap pelaksana sendiri, terutama saya sebagai Kepala Pelayanan ya harus berusaha mengayomi dengan baik”* (Wawancara, 11 September 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam implementasi pembangunan Desa Berbasis Gender di Desa Candiwates masih terus dilakukan dan membuat susunan program-program yang ramah gender. Sehingga nanti akan membentuk Desa Candiwates yang maju dan kuat. Berikut adalah saat sosialisasi dan menjelaskan suatu program dengan beberapa warga serta aparatur desa :



**Gambar 3.** Kegiatan Sosialisasi Program dan Pemilihan Penanggungjawab

Dalam gambar tersebut, pelaksana kebijakan atau aparatur desa sedang membahas tentang program baru dengan beberapa warga desa Candiwates. Dan menentukan posisi atau struktur penanggung jawab serta perbantuan lainnya. Dari wawancara secara langsung dapat dipahami bahwa dimensi Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk menjalankan Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender di Desa Candiwates. Kemudian hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dapat disimpulkan dalam wawancara secara langsung bahwa jika dilihat dari aspek ini sikap para pelaksana (Disposisi) merupakan aspek perilaku atau respon yang diambil pelaksana dalam menjalankan Implementasi Pembangunan Desa berbasis Gender di Desa Candiwates. Pelaksana Kebijakan tersebut adalah aparatur desa Candiwates. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu dari Suriani Nur berjudul *“Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup”* dimana pada penelitian ini Sikap pelaksana lebih agresif, akan tetapi peran perempuan sendiri yang masih malu dan tidak percaya diri dalam ikut meningkatkan partisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup. Hal ini sangat disayangkan jika perempuan terlalu diam dan tidak aktif dalam kegiatan apapun, apalagi hanya mengandalkan peran laki-laki. Dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat disandingkan dengan perbedaan masing-masing dalam penerapannya. Dalam kebijakan ini terbukti sikap pelaksana merencanakan program pembangunan desa berbasis gender bertujuan membantu semua kalangan laki-laki dan perempuan tanpa melihat dari sisi lainnya agar sama-sama berkembang dan terlibat. Tapi sayangnya, sikap pelaksana kebijakan masih belum dalam arah memperkuat program. Masih banyak perempuan yang masih berkeluh kesah dalam hal ini. Sering tidak dikaitkan dalam rapat atau program-program desa tertentu yang bertujuan dalam meningkatkan kemajuan desa.

#### **D. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi mengacu pada kecukupan birokrasi dalam menyelenggarakan

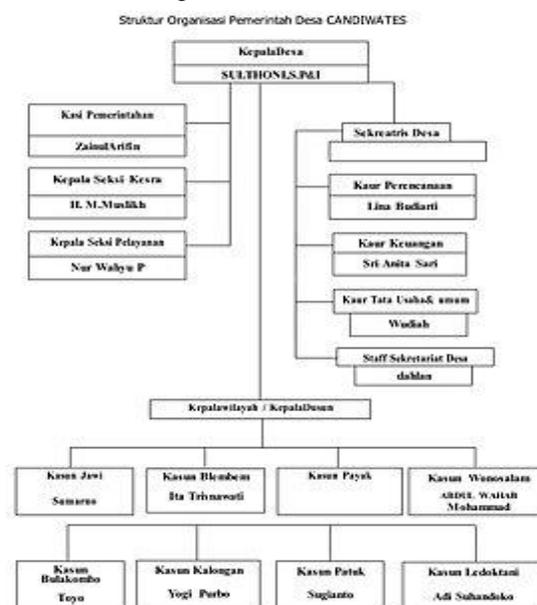
pelaksanaan kebijakan publik. Struktur birokrasi merupakan elemen penting dari implementasi kebijakan, dan jika tidak didukung oleh birokrasi yang baik, kebijakan yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik atau mencapai efektivitas yang optimal. Birokrasi merupakan bentuk kelancaran koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kegiatan, mulai dari pengambil keputusan hingga pelaksana.

Pada teori Edward dengan Indikator Struktur Birokrasi dapat dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan yang ke empat yaitu struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainal selaku Kasi Pemerintahan. Saya bertanya pada Bapak Zainal sebagai Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

*“struktur birokrasi kita dalam pola-pola hubungan, kerjasama, dan hubungan lainnya sudah tersusun sih mbak, dan kadang kita juga tidak lupa dengan mengadakan rapat yang membahas tentang hubungan kita satu aparatur desa dengan menyusun setiap jobdesk atau jabatan dan perbaruan jabatan juga. Dan kita juga sudah ada struktur organisasi sendiri mbak yang sudah terbentuk struktur birokrasinya, jadi bisa dilihat di dalam untuk pola-pola hubungan dan jabatan masing-masing. Kalau keterkaitan dalam Implementasi atau penerapan Pembangunan Desa berbasis gender ini kita insya allah juga sepemikiran dan berusaha menciptakan visi dan misi yang sama dengan tujuan ya tetap mendukung desa agar lebih maju. Jadi kita usaha sama sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa Struktur birokrasi dalam Implementasi Pembangunan Desa berbasis gender di desa Candiwates ini sudah menyusun pola-pola hubungan yang baik yang sesuai dengan jobdesk atau tugas masing-masing aparatur desa”* (Wawancara, 11 September 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Candiwates telah memiliki tujuan yang sama dalam pengimplementasian pembangunan Desa Berbasis Gender. Namun, saat ini masih ada proses penyusunan struktur birokrasi yang sesuai dalam mencapai pembangunan berbasis gender. Dalam Indikator Struktur Birokrasi ini memiliki persamaan pada penelitian terdahulu dari Elsa Purwaningsih dengan judul *“ Prespektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”*. Dimana memiliki persamaan dengan sama-sama mendukung atau menyusun struktur yang sesuai. Penelitian terdahulu menyusun program baru yang nanti akan diterapkan di kemudian hari. Dengan Struktur Birokrasi yang jelas dan dukungan aparatur pemerintah yang sangat antusias. Berikut adalah struktur birokrasi pada Implementasi Pembangunan Desa berbasis Gender pada Pemerintah Desa Candiwates Prigen Kabupaten Pasuruan yang tersusun dengan Struktur Organisasi terkait :

**Gambar 4.** Struktur Organisasi Pemerintah Desa Candiwates



Sumber : Diolah oleh Pemerintah Desa Candiwates

Pada gambar 2 diatas menjelaskan tentang struktur birokrasi yang berupa struktur organisasi yang terjadi dan hubungan yang terkait dengan Pemerintah Desa Candiwates. Dalam gambar 2 tersebut juga menjelaskan secara berurutan. Dimana penanggung jawab utama dalam Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender di Candiwates adalah Kepala Desa Candiwates. Kemudian dalam pembantuannya dibantu oleh Sekretaris Desa, serta perangkat pemerintah desa lainnya. Adapun keterkaitan warga juga sangat berpengaruh dalam penerapan pembangunan desa berbasis gender ini. Dengan adanya banyak dorongan atau dukungan dalam meningkatkan Pembangunan Desa berbasis Gender ini, akan memberikan banyak manfaat serta bentuk kesetaraan yang adil.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan serta penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa : Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender mengalami beberapa masalah dalam Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan diantaranya Dimana kegiatan Ibu PKK Sebagian besar kegiatan tersebut belum berjalan dengan lancar, dan kedua pelatihan dan workshop tentang hak – hak perempuan sebagian kecil belum terlaksana Serta permasalahan kekerasan fisik maupun non fisik yang sering terjadi pada perempuan, hal ini menyebabkan perasaan tersiksa dan tertekan. Masalah lainnya juga pelecehan seksual yang sering ditemui di Desa Candiwates ini.

Secara teori Edward III dapat dipaparkan ada 4 indikator yang terkait dengan Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender antara lain : yang pertama Komunikasi, Keterkaitan komunikasi pada penelitian ini adalah sosialisasi terkait program atau kegiatan perempuan di Desa Candiwates yang memang perlu dikembangkan lebih pesat lagi. mendukung atau menyusun struktur yang sesuai. Yang kedua Sumber Daya, Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dimana jumlah pegawai Desa Candiwates masih didominasi laki-laki. Yang ketiga adalah Disposisi Jika dilihat dari aspek ini sikap para pelaksana (disposisi) merupakan aspek perilaku atau respon yang diambil pelaksana dalam menjalankan Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender bertujuan membantu semua kalangan laki-laki dan perempuan tanpa melihat dari sisi lainnya agar sama-sama berkembang dan terlibat. Tapi sayangnya, sikap pelaksana kebijakan masih belum dalam arah memperkuat program. Dan yang terakhir yaitu Struktur Birokrasi, dimana struktur ini sudah jelas sesuai dengan peran yang bertanggung jawab terkait Pembangunan Desa di Candiwates.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Desa Candiwates yang telah memberikan peluang serta izin kepada saya untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender” di Candiwates atau desa saya sendiri. Terima kasih kepada aparaturnya Pemerintah Desa Candiwates yang sangat membantu dan antusias dalam penelitian saya, dan terima kasih kepada warga Desa Candiwates yang ikut turut berperan dalam penelitian saya. Tidak lupa dengan Orang tua saya yang selalu mendoakan yang terbaik, serta sahabat saya, dan yang paling utama Dosen Pembimbing saya, yang selalu memberikan saran dan kritik untuk mendukung penelitian saya agak menjadi penelitian yang sempurna. Tanpa mereka saya tidak bisa menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin.

## REFERENSI

- [1] R. A. Pratama, C. D. Wahyudi, K. K. Adisty, T. Cartika, R. Kamil, and A. Murtado, “Pembangunan Desa angandaran ( Hasil Musrenbang Perencanaan Pembangunan Desa Pangandaran ),” pp. 434–443.
- [2] A. Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa,” *Meraja J.*, vol. 2, no. 2, pp. 135–147, 2019, [Online]. Available: <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>
- [3] D. I. K. Banyumas, H. Nuraini, J. Administrasi, P. Fakultas, I. Sosial, and P. Unsoed, ““ Kebijakan Pro Gender Dalam Percepatan Pembangunan Desa Yang Berpihak Pada Perempuan,” vol. 6, no. November, 2019.
- [4] W. K. Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah),” *J. Anal. dan Pelayanan Publik*, vol. 2, 2016.
- [5] I. W. Budiarta, “Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan,” *J. Ilm. Ilmu Sos.*, vol. 8, no. 1, pp. 23–33, 2022, doi: 10.23887/jiis.v8i1.40982.
- [6] A. Agung, I. Ngurah, D. Prami, and N. P. Widiastuti, “Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Sektor Ekonomi Kreatif di Desa Paksewali,” vol. 12, no. 1, pp. 140–148, 2023.
- [7] N. Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar,” *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 12, no. 2, p. 167, 2017, doi: 10.21580/sa.v12i2.1707..

- [8] R. Probohiwi, "Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial," *J. Natapraja*, vol. 3, no. 1, pp. 41–72, 2015.
- [9] N. S. Wisnujati, "Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro," *J. Ilm. Sosio Agribis*, vol. 20, no. 2, pp. 67–81, 2020, doi: 10.30742/jisa20220201224.
- [10] M. Fanzikri, "Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di Aceh," *Al-Ijtima`i Int. J. Gov. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 1, pp. 81–106, 2019, doi: 10.22373/jai.v5i1.466.
- [11] N. Prasetyawati, "Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia," *IPTEK J. Proc. Ser.*, vol. 0, no. 5, p. 53, 2018, doi: 10.12962/j23546026.y2018i5.4421.
- [12] M. A. Nova, "Peran perempuan dalam pembangunan Desa (Studi femanisme dangender pada perempuan Desa Blang Krueng Aceh Besar)," *J. Al-Ukhwah*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2022.
- [13] F. Kurnianingsih, M. Mahadiansar, R. A. Putri, and O. R. Azizi, "Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 11, no. 1, pp. 45–55, 2022, doi: 10.23887/jish.v11i1.37594
- [14] K. Pemberdayaan, P. Dan, and P. Anak, "Rencana Strategis Deputy Bidang Kesetaraan Gender," 2020..
- [15] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), *pembangunan manusia berbasis gender 2020*. 2020.
- [16] E. E. Lasut, V. P. K. Lengkong, and I. W. J. Ogi, "Analisis Perbedaan Kinerja..." *J. EMBA*, vol. 5, no. 2, pp. 2771–2780, 2771.
- [17] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," in *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, 2016.
- [18] Erna Ermawati Chotim, "Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (studi terhadap ukm Cirebon home made)".
- [19] S. Nur, "Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan lingkungan hidup".
- [20] T. Kemajuan *et al.*, "Skripsi Perspektif Kesetaraan Gender."

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.